

MENTERI KESEHATAN MINTA

Hukum Berat Pemalsu Sertifikat Vaksinasi

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) meminta pelaku pemalsu Sertifikat Vaksin Covid-19 dihukum berat. Pihaknya juga berterimakasih kepada jajaran Polda Metro Jaya yang telah menangkap para pelaku.

"Harapan saya semoga pelaku dapat dihukum seberat-beratnya," ucap Menkes di Mapolda Metro Jaya, Senin (6/9).

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengungkapkan, pihaknya menangkap pegawai Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, berinisial HH (30) dan rekannya, FH (23), karena memalsukan Sertifikat Vaksinasi Covid-19. Sertifikat yang dijual kepada masyarakat secara online tanpa mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat tercatat dalam aplikasi PeduliLindungi.

Atas kejadian ini, Menkes mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan masa pandemi untuk mencari keun-

tungan pribadi dengan cara-cara yang tidak baik, terutama yang dapat merugikan orang banyak.

Sementara itu vaksin Sinovac kembali diterima Indonesia, Senin. Kedatangan vaksin jadi produksi Sinovac itu merupakan kedatangan vaksin tahap ke-50, sekaligus menjadi upaya Pemerintah menjaga ketersediaan stok vaksin. "Penambahan 5 juta dosis vaksin produksi Sinovac yang datang hari ini memastikan bahwa stok vaksin sudah aman," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Terhitung sejak kedatangan vaksin pertama pada Desember 2020, se-

cara keseluruhan Indonesia telah menerima sekitar 225,4 juta dosis vaksin dalam berbagai merek, dalam bentuk bulk maupun vaksin jadi.

Vaksin jadi Sinovac yang telah diterima sampai saat ini sebanyak 33 juta dosis, sementara dalam bentuk bulk 153,9 juta dosis. Vaksin lainnya yang telah diterima yakni AstraZeneca 19,5 juta dosis, Moderna 8 juta dosis, Pfizer 2,75 juta dosis, dan Sinopharm 8,25 juta dosis.

"Pemerintah selalu memastikan safety, quality, dan efficacy untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh. Semua sudah melalui proses evaluasi oleh Badan POM dan rekomendasi dari ITAGI, WHO, dan para ahli. Semua merek vaksin berkualitas untuk melindungi. Jadi, masyarakat tidak perlu memilih-milih. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang saat ini tersedia," tutur Airlangga. **(Ati/Lmg)-d**

BANK BPD DIY

Genjot Kredit Perumahan Murah



KR-Istimewa

Rumah murah dengan harga terjangkau bisa diperoleh lewat KPR Sejahtera FLPP Bank BPD DIY.

YOGYA (KR) - Sejak digulirkan Pemerintah tahun 2010, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Dalam rangka mendukung keberhasilan Program Sejuta Rumah, Bank BPD DIY sebagai salah satu bank yang dipercaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan

Perumahan (PPDPP) menyalurkan Kredit Pemilihan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), terus menggenjot penyaluran program tersebut. Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengatakan, penyaluran KPR Sejahtera FLPP Bank BPD DIY tahun 2021 hingga Agustus 2021 telah mencapai 90 persen dari kuota yang diberi-

kan. Bahkan dengan animo masyarakat DIY yang besar, saat ini Bank BPD DIY telah mengajukan penambahan kuota penyaluran agar dapat memenuhi seluruh pengajuan kredit yang masuk.

Bank BPD DIY telah bekerja sama dengan sembilan pengembang untuk menyalurkan KPR FLPP di wilayah Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan Kulonprogo. "Terdapat sembilan lokasi perumahan di Gunungkidul, di antaranya Marison Wonosari, Perumahan Bhayangkara Residence, Perumahan GriyaKurnia 2, Perumahan Amalia Regency, Perumahan Ndalem Amalia, Dewi Sinta Residence, dan Ndalem Nakulo. Di Bantul yaitu Perumahan Bangun Graha Metes dan Pesona Trimulyo Asri. Untuk Sleman yakni Mulia Purnama Residence. Sementara di Kulonprogo Perumahan Ndalem Giripeni," kata Santoso Rohmad, Senin (6/9). **(Ria)-d**

Jangan Sambungan hal 1

dan sangat memprihatinkan. Ini harus diantisipasi ke depan," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, Senin (6/9).

Huda khawatir jika warga euforia, kemudian lengah bukan mustahil lonjakan kasus bisa terjadi lagi dan semua bisa sangat rugi. Karena itu, perlu ketegasan dan penegakan aturan, termasuk batasan maksimal pengunjung di sebuah objek wisata, restoran dan layanan publik. Termasuk terus dilakukan penegakan prokes dengan ketat.

"Kesempatan kasus turun ini harus dimanfaatkan untuk percepatan vaksinasi, sesuai target. Pada bulan November awal, diharapkan bisa tercapai targetnya," ujar Huda.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji juga meminta masyarakat untuk tidak lengah setelah diturunkannya level PPKM di DIY. "Saya minta kebijakan PPKM ini benar-benar ditaati supaya kondisinya bisa segera membaik. Saya tidak ingin lagi

melihat destinasi wisata ramai kembali seperti akhir pekan lalu. Untuk itu Pemda melalui Sat Pol PP Kabupaten/Kota akan berusaha mencegah agar tidak ada kerumunan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di kantornya, Senin (6/9).

Terkait munculnya kerumunan di tempat destinasi wisata, Baskara Aji mengakui tidak mudah. "Paling-paling yang bisa dilakukan ialah melarang kendaraan parkir di tempat yang tidak seharusnya misalnya ketika tempat khususnya parkir kendaraan wisatawan tutup. Dengan cara itu diharapkan adanya kerumunan bisa dikurangi," terangnya.

Sementara untuk pembelajaran Tatap Muka (PTM), Baskara Aji menandakan, belum bisa dilaksanakan jika capaian vaksinasi belum tercapai. Setelah turun level ini, untuk pembelajaran tatap muka terbatas akan dilakukan dalam kapasitas uji coba.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP)

Setda DIY Ditya Nanaryo Aji menyatakan kasus aktif Covid-19 di DIY terus mengalami penurunan selama sepekan terakhir pada awal September 2021 ini. Penambahan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 198 kasus sehingga total 151.862 kasus pada Senin (6/9).

"Rerata kasus positif harian mencapai 4,69 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 8.127 kasus. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yaitu 162 kasus tracing kontak positif, 25 kasus periksa mandiri dan 11 kasus belum ada informasi," tuturnya.

Ditya melaporkan angka kesembuhan terus bertambah cukup signifikan sebanyak 648 kasus dengan demikian total kasus kesembuhan di DIY mencapai 138.751 kasus. Sementara itu, kasus pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY bertambah 15 kasus sehingga total kasus meninggal mencapai 4.984 kasus. **(Jon/Ria/Ira)-d**

KPU Usulkan Sambungan hal 1

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan RDP itu merupakan tindak lanjut rapat kerja sebelumnya, dimana komisi II membentuk tim kerja bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, untuk menyusun konsep dan desain penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kita sama-sama paham, kalau di tahun 2024 adalah tahun politik, karena sepanjang tahun kita menyelenggarakan event politik dan itu bukan hal yang mudah," kata Doli.

Sedangkan untuk pilkada serentak KPU mengusulkan dilaksanakan 27 November 2024. Hal itu, mengacu pada UU No 10 tahun 2016. Ketua KPU Ilham menjelaskan alasan penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan (Juni 2017 sampai Juni 2018), persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan (Agustus 2017 sampai

April 2019) dan persiapan pemilihan 2020 (September 2019 sampai Desember 2020). "Untuk persiapan sudah disetujui bersama selama 25 bulan untuk Pemilihan 2024 sebelum hari pemungutan suara," ujarnya.

Ilham merincikan penggunaan waktu itu yakni verifikasi kepengurusan partai politik untuk penelitian dan perbaikan selama 30 hari. Durasi verifikasi faktual parpol tingkat provinsi, kabupaten/kota selama 53 hari. Kemudian, durasi pembentukan PPK, PPS dan KPPS selama 92 hari. Durasi pematihan data pemilih 30 hari. Kampanye selama 120 hari, masa kerja PPK dan PPS selama enam bulan sebelum dan dua bulan setelah pilkada serta durasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari dan durasi masa kampanye kepala daerah selama 60 hari, pada forum yang sama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan

empat rekomendasi terkait Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Ketua Bawaslu RI Abhan dalam rapat tersebut menjelaskan rekomendasi itu yakni membenahi kendala regulasi/payung hukum pemilu yang masih tumpang tindih, tidak jelas dan multitafsir

Kemudian, mendorong perbaikan manajemen penyelenggaraan teknis dan penyelenggaraan pengawasan pemilu. Mengoptimalkan koreksi administrasi terhadap akibat yang muncul dari tindakan pelanggaran hukum pemilu guna memulihkan hak-hak peserta pemilu dan masyarakat serta mengembalikan integritas proses dan hasil pemilu.

Selanjutnya, mendorong prioritas pendekatan sanksi administratif dalam penegakan hukum pemilu dalam rangka memulihkan hak peserta pemilu dan masyarakat serta meningkatkan efek jera bagi para pelanggar. **(Sim/Ant)-d**

UMKM Sambungan hal 1

Keyakinan terkait pascapandemi juga tidak bisa lepas dari penegasan WHO bahwa era global pada akhirnya harus berdampingan dengan Covid-19. Meskipun di sisi lain publik haruslah tetap produktif, bekerja dan berusaha, apapun jenis usahanya tanpa terkecuali. Artinya rentang waktu selama semester I 2021 memberikan pembelajaran bahwa Covid-19 adalah ancaman meski tidak bisa diabaikan adanya peluang. Sehingga masyarakat di masa depan harus tetap berdampingan dengan semua ancaman virus yang ada.

Optimisme seperti disampaikan Presiden Jokowi terkait era kebangkitan pascapandemi setidaknya dibuktikan dengan geliat ekonomi, baik di perkotaan atau pedesaan. Sehingga hal ini mampu memacu roda perekonomian secara berkelanjutan pascapandemi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang

mengizinkan penduduk berusia di bawah 45 tahun boleh beraktivitas di luar rumah pasca pandemi juga diapresiasi.

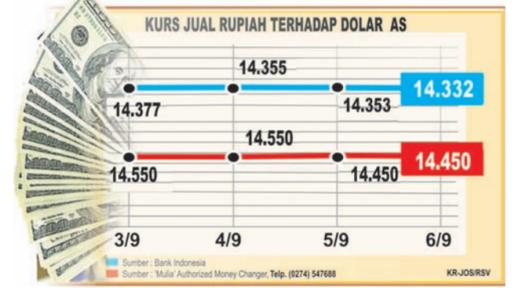
Tidak bisa dipungkiri bahwa kilas balik semester I 2020 memudahkan semua optimisme perekonomian, tidak hanya nasional tapi juga global. Sehingga semua negara melakukan revisi pertumbuhan dan kalangan bisnis - industrialisasi juga merevisi semua targetnya. Setidaknya ini terkait model kebijakan *work from home, stay at home, lockdown, juga social distancing*. Semua berpengaruh terhadap geliat ekonomi bisnis. Bahkan UMKM tidak bisa mengelak sehingga matarantai *supply-demand* tereduksi. Terkait ini maka perhatian pemerintah ke sektor UMKM benar adanya.

Strategi yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap kebangkitan UMKM yaitu menggan-

deng BUMN untuk bermitra dengan UMKM. Argumen yang mendasari karena UMKM menjadi salah satu pelaku ekonomi yang menopang perekonomian di tengah tantangan global termasuk juga perannya terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 90% dan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60%. Selain itu data pada tahun 2019 menggambarkan bahwa peran UMKM terhadap perekonomian mencapai sekitar Rp 8.000 triliun.

Pemetaan UMKM terdampak pandemi sektor usaha makanan-minuman skala mikro 27%, skala kecil 1,8%, skala menengah 0,07%. Data lain untuk usaha kerajinan berbahan kayu dan rotan mencapai 17%. Persoalan UMKM dan ekonomi di masa pandemi menarik dicermati dan berimplikasi makro.

(Penulis adalah Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo)-d



Prakiraan Cuaca Selasa, 7 September 2021						
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelambaban
Bantul	☀	☀	☁	☁	24-30	70-90
Sleman	☀	☀	☁	☁	23-29	75-95
Wates	☀	☀	☁	☁	24-28	80-95
Wonosari	☀	☀	☁	☁	23-30	65-90
Yogyakarta	☀	☀	☁	☁	23-29	75-95

Tingkatkan Kemampuan UMKM Kuliner Sleman

Dosen dan Mahasiswa AMIKOM Beri Pelatihan Phone Photography

Riski Damastuti, S.Sos., M.A.

KEBIJAKAN pemerintah agar masyarakat tetap dirumah selama pandemi Covid-19 mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan gaya hidup yang terlihat jelas adalah perubahan gaya berbelanja. Kebiasaan belanja yang semula harus dilakukan secara langsung mulai bertransformasi menjadi kebiasaan belanja online. Data mengenai perubahan tersebut dirangkum dalam riset yang dilakukan Indonesian E-COMMERCE Association dan YLKI yang menunjukkan bahwa selama pandemi covid-19, aktivitas belanja online masyarakat Indonesia meningkat hingga 30%.

Perubahan kebiasaan belanja online masyarakat memberikan tantangan bagi pelaku usaha untuk berinovasi dengan komunikasi pemasaran digital. Tak sedikit pelaku usaha yang sudah menjual produknya melalui media sosial, e-commerce, maupun layanan pesan antar. Salah satu usaha online yang berkembang di masa pandemi adalah kuliner. Data Badan Pusat Statistik 2020 menunjukkan bahwa transaksi penjualan kuliner online meningkat sebanyak 50% pada bulan Februari hingga Juli 2020. Peningkatan usaha kuliner, terutama kuliner rumahan turut didukung oleh platform layanan pesan antar yang memberikan layanan jual beli makanan, sebut saja go food dan grab food, dan yang terbaru adalah shopee food.

Berjualan makanan secara online tentunya membutuhkan kemampuan food photography supaya dapat mempresentasikan produk dengan baik. Presentasi produk yang ditampilkan dalam bentuk foto bertujuan untuk menumbuhkan intensi membeli dalam benak konsumen. Kemampuan food photography membutuhkan keahlian teknis, perencanaan konsep, serta alat yang memadai. Untuk meningkatkan kemampuan UMKM Kuliner, Universitas Amikom Yogyakarta melalui program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa membuat pelatihan Phone Photography bagi pelaku UMKM kuliner di Sleman.

Pelatihan Phone Photography merupakan salah satu dari rangkaian program yang dilakukan dalam rangka edukasi komunikasi pemasaran digital yang dimulai sejak tahun 2020. Pelatihan Phone Photography untuk pelaku UMKM Kuliner diadakan di Mundu Saren Depok Sleman. Berdasarkan data yang diperoleh dari data Gross Regional Domestic Product, diketahui bahwa pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor makanan dan minuman di Sleman menurun. Serta tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 5,09% pada tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, terdapat peluang untuk meningkatkan laju pertumbuhan sektor makanan dan minuman dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mulai berwirausaha online di bidang kuliner. Salah satu kemampuan yang diperlukan dalam memulai usaha online kuliner adalah kemampuan foto produk.

Foto produk yang paling sederhana dan murah dapat dilakukan dengan smart phone. Smart phone mengakomodasi proses pembuatan foto produk, mulai dari kamera, fitur editing, hingga mengunggah foto tersebut. Pelatihan ini mewajibkan peserta untuk membawa peralatan yang kerap digunakan saat membuat foto produk, terutama smart phone. Dengan mengenal fitur-fitur kamera dan editing pada smart phone, diharapkan dapat memudahkan peserta dalam melakukan foto produk.

Pelatihan ini dilakukan dengan kerjasama antara dosen dan mahasiswa yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang fotografi. Dalam pelatihan ini, peserta diberikan edukasi terkait pentingnya foto produk, konsep-konsep foto produk kuliner, alat, fitur serta aplikasi yang mendukung proses foto produk. Terdapat 3 metode yang digunakan dalam pelatihan ini, yaitu pemberian materi, diskusi, serta praktik foto produk dengan pendampingan langsung oleh praktisi. Setelah peserta melakukan praktik foto produk, dipilih 3 orang peserta dengan foto terbaik yang akan mendapatkan alat-alat pendukung foto produk. Melalui pelatihan ini, diharapkan pelaku UMKM kuliner dapat meningkatkan kemampuan foto produk dengan memaksimalkan penggunaan smart phone. (*)